



## DATA ASET

### Gampang- Gampang Susah

**HINGGA** kini masalah pendataan aset daerah masih jadi masalah serius yang dihadapi masing-masing SKPD di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu. Bahkan, sebagian besar aset yang ada di setiap SKPD masih bernilai nol dan satu. Untuk itu butuh kerja keras, koordinasi dan dukungan dana dari APBD untuk melakukan pendataan, mulai dari kabupaten, kecamatan hingga ke desa dan dusun. Menurut Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang, Nusantara Gawat, melakukan pendataan aset, terlebih di kecamatan dan desa, gampang-gampang susah. "Kami sudah berusaha melakukan pendataan, mulai dari jalan, jembatan, sarana dan prasarana air bersih serta aset lainnya di Dinas Cipta Karya dan Tara Ruang," tutur Gawat.

Pada rapat kerja yang dipimpin Sekda Kapuas Hulu Ir. H.M Sukri dan Kepala DP-PKAD Drs H.M Zainis MM yang membahas masalah aset daerah, Gawat mengatakan. Untuk mendukung kelancaran pendataan dan pembenahan aset daerah, terutama di kecamatan, harus didukung dana. Karenanya kedepan masing-masing SKPD diharapkan bisa mengusulkan dana untuk pendataan aset di dinasny.

Masalah yang sama juga disampaikan Sekretaris Bina Marga dan Pengairan Ledung, S. Sos, dikatakan di Kapuas Hulu ada 124 jalan dengan panjang 1.147 km yang menjadi kewenangan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kapuas Hulu. Guna mendukung pendataan aset berupa jalan ini, pihaknya sudah surati camat, hanya saja dari 23 camat, baru camat Putussibau Utara yang sudah menyampaikan datanya. "Prinsipnya kami siap melakukan pendataan dan kami juga sudah menyurati camat di 23 kecamatan. Hanya saja, kami tidak didukung pendanaan, untuk itu mohon petunjuk," kata Ledung.

Dukungan camat dimaksud adalah tentang data desa-desa dan dusun yang dilewati jalan yang jadi kewenangan Bina Marga. "Kami kesulitan menghitung nilai NJOP, karena NJOP setiap desa itu berbeda," ucapnya.

Menanggapi masalah tersebut, Sekda Kapuas Hulu Ir. H.M Sukri mengatakan, masing-masing SKPD mesti segera menuntaskan data aset yang menjadi kewenangan mereka. "Untuk ini karena BPK untuk audit datang lebih awal. "BPK akan datang lebih awal dari jadwal sebelumnya, dan untuk kali ini tidak ada istilah pra audit, tetapi hanya sekali yakni langsung audit," terang Sukri.

Untuk itu, kata Sukri, aset yang di kuasai masing-masing SKPD mesti segera dicatat. Seperti Dinas Bina Marga dan Pengairan, belum pernah mencatat jalan yang menjadi kewenangan mereka. Begitu juga dengan Cipta Karya, hanya jalan desa yang belum dicatat. **(aan)**